



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

#JabarJuaraLahirBatin



45.779.597

JUMLAH PENDUDUK
PROVINSI JAWA BARAT

Terbanyak

Kabupaten Bogor: 4.715.925 JIWA

Paling Sedikit

Kota Banjar: 205.626 JIWA

*Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 5 mt II Tahun 2019

A. INDIKATOR MAKRO

72,03^{POIN}
Indeks Pembangunan Manusia

6,82%
Tingkat Kemiskinan (3,38 Juta Jiwa)

7,99%
Tingkat Pengangguran Terbuka (1,90 Juta Orang)

5,07%
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB: Rp. 2.125,16 Triliun)

30,25^{USD TA/FAHON}
Pendapatan Perkapita (Th. 2018: 2.916 Juta)

0,398
Ketimpangan Pendapatan (Th. 2018: 0,405)

B. URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

BIDANG PENDIDIKAN

63,04^{POIN}
Indeks Pendidikan

20.950.488
Penduduk Melek TIK (Usia 12 Tahun keatas)

8,37^{TAMU}
Rata-Rata Lama Sekolah

12,48^{TAMU}
Harapan Lama Sekolah

78,04%
APK Sekolah Menengah

98,60%
Angka Kelulusan Pendidikan Menengah (dari 602.589 Siswa)

1,62%
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (dari 2.023.049 Siswa)

107,77%
Angka Melanjutkan Sekolah dari SM/PTs ke SMA/SMK/Se derajat (620.199 siswa)

80,88%
Akreditasi SMA/SMK/MA Berakreditasi A atau B (dari jumlah 4.525 Sekolah)

100%
Jumlah Pendidik yang Memiliki Ijazah D-IV/S1 dan Sertifikat Pendidik (dari 86.931 Pendidik)

100%
Jumlah Kepala Sekolah yang Memiliki Ijazah D-IV dan S1 dan Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah (dari 357 Kepala Sekolah)

PENGANTAR

Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019. Penyampaian Ringkasan LPPD ini juga untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik bersama dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Ringkasan LPPD Tahun 2019 memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial), hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi Daerah.

Melalui penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 tersebut diharapkan diperoleh masukan dan saran dalam rangka memajukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan yang lebih baik.

Gubernur Jawa Barat,

Mochamad Ridwan Kamil

BIDANG KESEHATAN

78,30
Rasio Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup

3,28
Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

83,33%
Rumah Sakit Rujukan Provinsi Terakreditasi (5 Dari 6 Rs)

26,21%
Prevalensi Stunting

95,89%
Puskesmas Terakreditasi

98,02%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

95,25%
Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk dan Stunting

100%
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/Potensi Bencana

0,29%
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi (13.749 Orang)

98,82%
Pelayanan Ibu Bersalin

92,54%
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

91,90%
Kondisi Baik Ruas Jalan Kewenangan Provinsi (dari 1.217.761 KM)

82,02%
Pelaksanaan Rehabilitasi/Direkonstruksi Ruas Jalan Provinsi (dari 5.960 KM)

100%
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

95,46%
Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional

78,78%
Cakupan Pelayanan Air Minum

69,01%
Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah

2,45%
Kapasitas Penyulutan Air Cuci Rata-rata Kabupaten/Kota Terhadap Pelayanan Air Minum (Baru 15 PAM Regional Tahap I)

76,71%
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

91,70%
Penyediaan Rumah Layak Huni

98,72%
Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni

100%
Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Program Pemerintah dan Pasca Bencana

40,47%
Penanganan Kawasan Kumuh

100%
Layanan Pembiayaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara

89,59%
Rumah Layak Huni

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

77,50%
Indeks Ketertarikan dan Ketertiban

100%
Penyelesaian Gangguan Trantibum Berdasar kan Pengaduan

100%
Penegakan Perda dan Perkada yang Memuat Sangsi

100%
Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Syah/ Legal (2 Dokumen)

100%
Penanganan Tanggap Darurat Bencana dari 24 Daerah di Wilayah Provinsi yang Mengalami Bencana.

60%
Personil Satpol PP Berkualitas PPNS (30 dari 50 orang)

BIDANG SOSIAL

100%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang di dalam Panti (dari 100 orang)

100%
Pemenuhan Kebutuhan Anak Terlantar di Dalam Panti (dari 700 orang)

55,71%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti (dari 320 orang)

100%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi. (dari 7.966 korban)

50 ORANG
Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersedia di Dalam Panti

30 ORANG
Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikoterapis, Perawat, dan Bidan) yang Tersedia di Dalam Panti

C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

PERINGKAT KE

2

Dari 33 Provinsi di Indonesia dengan skor 3,2496 dan dengan status Sangat Tinggi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD Tahun 2017 secara Nasional.

Sejak Tahun 2014, Provinsi Jawa Barat selalu berada pada posisi 3 (tiga) besar terbaik Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



D. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2018

8

KALI BERURUTAN TURUT MEMPERTAHANKAN OPINI "WTP" DARI BPK RI.

UPAYA YANG DILAKUKAN:

- Membangun komitmen seluruh tingkat pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk patuh pada peraturan perundang-undangan, transparan dan akuntabel.
- Pengembangan SDM pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui penyelenggaraan bimtek pengelola keuangan daerah.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui:
 - Terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK.
 - Melakukan proses tindak lanjut atas temuan BPK.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

RP. 35,833 T
Belanja Daerah Tahun 2019

RP. 28,033 T
Belanja Tidak Langsung

RP. 7,799 T
Belanja Langsung

RP. 36,037 T
Pendapatan Daerah

"Sebelum Pemeriksaan BPK"

F. INOVASI DAERAH JAWA BARAT



Jabar Saber Hoaks: bertugas memberikan informasi klarifikasi dan akurasi pada warga Jawa Barat.



Jabar Quick Response: kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat, hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat.



One Village One Company (OVOC): Memaksimalkan potensi desa dan menurunkan angka pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi, kemandirian dan penerapan konsep e-commerce.



One Pesantren One Product (OPOP): Membangun kemandirian Pesantren melalui pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia (pendampingan usaha, temu bisnis, pelatihan, pemagangan dan promosi produk).



Mobil Aspirasi Kampung Juara/Maskara: Penghormatan kepada desa yang berhasil/berprestasi menaikkan status desa.

*Inovasi ini hanya berupa contoh dari inovasi Daerah Jawa Barat mengingat keterbatasan halaman.

FORMAT MASUKAN

Kolom Penyampaian Saran dan Masukan dari Masyarakat Terhadap Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Terhadap Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, disampaikan saran/masukan sebagai berikut:

-
-
-

Pengirim :
Nama :
Alamat :

Catatan:

- Saran/Masukan dapat dikirim melalui Biro Humas dan Protokol Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Jln. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 Tlp. (022) 423448; 4233347; 4230963 Pswt, 308; Fax (022) 4203450 atau melalui email: info@jabarprov.go.id
- Informasi selengkap-lengkapnya tentang LPPD dapat diakses melalui website jabarprov.go.id